LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN I TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunandaerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 sampai Triwulan IV melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada APBD Tahun Anggaran 2026 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Program, Kegiatan, dan SubKegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkanpencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2025 - 2045.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah menilai capaian target kinerja, tujuan dan sasaran DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2026, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB. III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
4. BAB. IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini

dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerjayang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakankriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

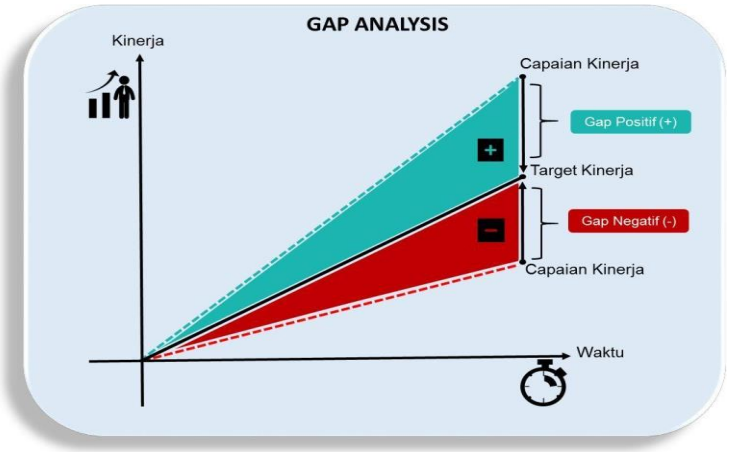
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telahmemenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkanantara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



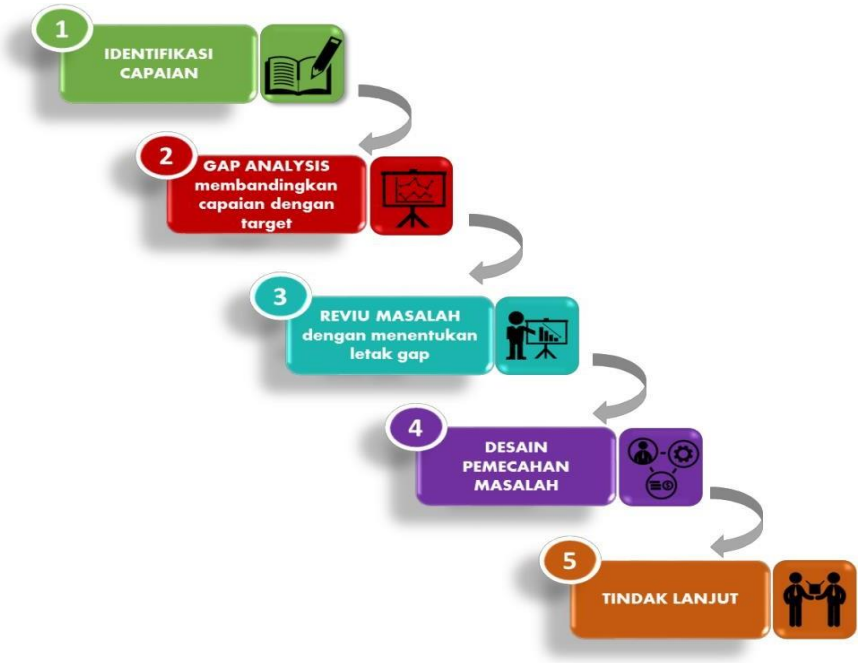
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupunnegatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangn tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasiRenja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2026

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2026		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Tujuan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Indeks Desa	0,7812	0	0 %
	Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa	2. Tingkat Status Perkembangan Desa	47,3%	0 %	0 %

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026 Pencapaian status Persentase Desa Mandiri.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***							
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	***Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah***	**76**	**5.673.584.840,25**		**3.922.028.574**	***104,5%***	***62,98%***
1.1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**18 Laporan**	**21.000.000**	**8 Laporan**	***15.004.689***	44,44%	***71,45%***
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**18 Laporan**	**21.000.000**	**8 Laporan**	***15.004.689***	44,44%	***71,45%***
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		18 Laporan	21.000.000	8 Laporan	*15.004.689*	44,44%	*71,45%*

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	21.000.000	8 Laporan	*15.004.689*	44,44%	*71,45%*
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**		**4.902.425.942**		**1.044.380.573**		**21,30%**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	4.898.425.942	31 Orang/bulan	1.044.380.573	**100%**	**21,32%**
	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan	4.000.000				

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan					
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	0	**100%**	**0%**
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan	2.000.000	33 Laporan	0	**45,83%**	**0 %**
1.3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		0	-				

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkkapan	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	0	0				
1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya							
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0				
1.4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			155.139.440				
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.555.865				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket					
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket					
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor							
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	1.994.000	0 Paket	0	0 %	***0%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
		Bangunan Kantor yang Disediakan						
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	26.268.265	2 Paket	988.000	100%	***3,76%***
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	993.600	1 paket	964.794	12,5%	***97,10%***
	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	125.883.575				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen					
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000 Dokumen					
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	200.000	25%	***8%***
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	122.402.375	97 Laporan	18.084.336	16,17%	***14,77%***
1.4.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000 Dokumen	981.200	344 Dokumen	719.280	11,47%	***73,31%***
1.5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							
	Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**						
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang						

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
		Disediakan						
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas Jabatan							
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						
1.5.2	Pengadaan Kendaraan Operasional / Lapangan							
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						
1.5.3	Pengadaan Mebel		0 unit	0	0 Unit	0	0%	*0%*
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						
1.5.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						
1.6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							
	Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang**	24 Laporan	**92.668.000**				

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
		Disediakan						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan					
1.6.1	Penyedian Jasa Surat Menyurat							
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	33.768.000	0 Laporan	7.304.783	0%	***21,63%***
1.6.2	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	58.900.000	6 laporan	15.254.922	25%	***25,90%***
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
1.7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**502.351.458,25**		**150.336.210**		**29,93%**

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
	Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Mebel yang Dipelihara**		**502.351.458,25**				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	212.550.000,25	3 Unit	62.117.764	42,86%	***29,22%***
1.7.2	Pemeliharaan Mebel							
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	1.049.700	0 Unit	0	0%	***0%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	13.510.300	0 Unit	9.590.000	0%	70,98%
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	275.241.458	0 Unit	78.628.446	0%	***28,57%***
2.	***PROGRAM PENATAAN DESA***							
	Meningkatnya Penataan Desa yang Legal, Efektif dan Berkelanjutan	***Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi penataan Desa***	**28%**	**56.420.800**		**1.810.000**		***3,21%***
2.1	**Penyelenggaraan Penataan Desa**			**56.420.800**		**1.810.000**		***3,21%***
	Terlaksananya Penyelenggaraan Penetaan Desa	**Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi**		**56.420.800**				
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya						
		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan,						

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
		Penggabungan, dan Perubahan Status Desa						
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya						
2.1.1	Pembentukan Penghapusan ,Penggabungan dan Perubahan Status							
	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	10.900.000	0 Desa	0	0%	***0%***
2.1.2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa							
	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	30 Desa	25.720.800	10 Desa	1.810.000	33,33%	***7,04%***
2.1.3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa							
	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	25 Desa	10.900.000	0 Desa	0	0%	***0%***
2.1.6	Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa							

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	10 Unit	8.900.000	0 Unit	0	0%	***0%***
3.	***PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA***							
	Terjalinnya Kerjasama Desa yang Produktif dan Legal	Persentase Desa yg melaksanakan kerja sama yang produktif dan legal	**87%**	**95.236.000**		**15.359.566**		***16,13%***
3.1.	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan**		**95.236.000**		**15.359.566**		***16,13%***
	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar desa	**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan**		**95.236.000**				
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota						
3.1.1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa							

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	10 Dokumen	46.668.000	4 Dokumen	8.304.783	40%	***17,79%***
3.1.2	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga							
	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	10 Dokumen	5.900.000	4 Dokumen	0	40%	***0%***
3.1.3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan						
	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	42.668.000	2 Dokumen	7.054.783	100%	***16,53%***
4.	***PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA***							
	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	***Persentase desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik***	77,7%	**3.121.993.000**		**866.837.151**		***27,76%***
4.1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**			**3.121.993.000**		**866.837.151**		***27,76%***
	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**1 Dokumen**	**202.560.000**				

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan					
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	2 Laporan					
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan					
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	264 Dokumen					
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	264 Orang					
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	528 Dokumen					
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	264 Dokumen					

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	**230 Dokumen**					
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	**21 Dokumen**					
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	**500 Orang**					
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa							
	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	0	100 %	***0%***
4.1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa							
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	528 Dokumen	60.000.000	0 Dokumen	0	0%	***0%***
4.1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa							

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	264 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	0	0%	***0%***
4.1.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa							
	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	500 Orang	8.000.000	0 Orang	0	0%	***0%***
4.1.7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa							
	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	24.000.000	0 Laporan	0	0%	***0%***
4.1.8	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa							
	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	8.000.000	0 Laporan	900.000	0%	***11,25%***
4.1.9	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa							
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang	264 Dokumen	7.000.000	0 Dokumen	0	0%	***0%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
		tersusun						
4.1.10	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa							
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	20 Dokumen	10.560.000	0 Dokumen	4.390.000	0%	***41,57%***
4.1.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD							
	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	264 Orang	50.000.000	0 orang	0	0 %	***0%***
4.1.12	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa							
	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	2 Laporan	5.000.000	1 Laporan	3.000.000	50%	***60%***
4.1.13	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan							
	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 Dokumen	5.000.000	0 Dokumen	0	0%	***0%***
	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Desa	**Persentase BUMDes yang aktif dan menghasilkan laba**	**25%**					

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							
	Meningkatnya tingkat keaktifan BUM Desa	**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa**	**264 Desa**	20.560.000				
4.1.6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa							
	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	20 Dokumen	20.560.000	0 Dokumen	6.930.000	0%	***33,71%***
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa	Persentase desa dengan tata kelola keuangan yang baik	78%					
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	206 Dokumen	2.898.873.000				
4.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa							
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	206 Dokumen	2.898.873.000	44 Dokumen	851.617.151	21,36%	***29,38%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
5	***PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT***							
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	***Persentase Desa yang Kapasitas kelembagaannya diberdayakan***	**37%**	**484.620.400**	**2,60%**	**60.185.783**	**7,03 %**	***12,42%***
5.1.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan**		**484.620.400**		**60.185.783**	**65,25%**	***12,42%***
	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa	**Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat**	**300 Dokumen**	**484.620.400**				

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	**384 Lembaga**					
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	**2 Dokumen**					
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	**110 Dokumen**					

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	**2 Laporan**					
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	**1 Laporan**					
5.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	300 Dokumen	63.620.400	27 Dokumen	2.559.000	9%	***4,02%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
5.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	384 Lembaga	25.000.000	0 Lembaga	6.237.000	0%	***24,95%***
5.1.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa							
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						
5.1.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna							
	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan	2 Dokumen	3.000.000	0 Dokumen	0	0%	***0%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2026					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
		Teknologi Tepat Guna						
5.1.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat							
	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	3.000.000	0 Laporan	0	0%	***0%***
5.1.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							
	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	110 Dokumen	380.000.000	29 Dokumen	51.389.783	100%	***98,09%***
				9.431.855.040		**2.163.066.905**		**22,93%**

1. **Analisis capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2026**

❖ ***Dalam Pelaksanaan Program, Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Keluaran sebagai berikut :***

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi berupa jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
3. Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
4. Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD.
5. Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.
6. Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan.
7. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.
8. Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan.
9. Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD.
10. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
11. Jumlah Laporan penyediaan jasa Surat Menyurat.
12. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.
13. Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.
14. Jumlah Mebel yang di pelihara.
15. Jumlah Peralatan Mesin yang di pelihara.

16. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Gedung yang dipelihara/di rehabilitasi.

- ***Dalam pelaksanaan Program Penataan Desa telah direalisasi keluaran yaitu data desa yang mendapatkan fasilitasi penataan desa***

  - Realisasi keluaran Program Penataan desa didukung keluaran dari kegiatan penyelenggaraan penataan desa berupa : jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi di bidang penataan desa yang didukung oleh sub kegiatan :
    1. Fasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa dengan keluaran : Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa.
    2. Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan keluaran : Jumlah desa yang melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai Permendagri 45 tahun 2016.
    3. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dengan keluaran Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan kewenangan desa.
    4. Fasilitasi Sarana Prasarana Desa dengan keluaran : Jumlah Unit Sarana Prasarana Desa hasil fasilitasi.

- ***Dalam pelaksanaan Program Kerja sama Desa telah direalisasi keluaran yaitu data desa yang mendapatkan fasilitasi kerjasama desa***

  - Realisasi keluaran Program Kerjasama Desa didukung keluaran dari kegiatan penyelenggaraan kerjasama desa berupa : data desa yang mendapatkan fasilitasi di Kerjasama desa yang didukung oleh sub kegiatan :
    1. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam kabupaten/kota dengan keluaran : jumlah dokumen hasil fasilitasi fasilitasi

Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota.

2. Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dengan keluaran : jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga.
3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan keluaran : Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pembangunan Kawasan perdesaan.

❖ ***Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa***

Analisis Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2026

- Analisis Capaian Kinerja dalam pelaksanaan program administrasi pemerintahan desa Indikator keluaran adalah jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi tata kelola Administrasi Pemerintahan Desa.
- Realisasi keluaran program administrasi pemerintahan desa didukung keluaran dari kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa berupa desa yang mendapatkan fasilitasi tata kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa.
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas.

5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan keluaran Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
7. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Profil Desa Yang Tersusun.
8. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dengan keluaran : Jumlah Anggota BPD Yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas.
9. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa dengan keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa.
10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

❖ ***Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Keuangan Aset dan Ekonomi Desa***

- Analisis capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Bidang Keuangan, Aset, dan Ekonomi Desa

  Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 berfokus pada Siklus Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Fasilitasi Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026, Pembinaan Pengelolaan Aset Desa, Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Desa,

Pembinaan Pengelolaan BUM Desa, serta Monitoring perkembangan pengelolaan BUM Desa.

- Realisasi Program Administrasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026, kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat mandatori yaitu Pembangunan Gedung Pergudangan dan Kelengkapan KDMP di desa desa di Kabupaten Nganjuk tetap menjadi isu strategis. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut secara langsung berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan kepada desa di kabupaten Nganjuk, yang diimplementasikan pada 3 Subkegiatan, antara lain:

1. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

   Tugas dan fungsi pembinaan pada subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa diawali dengan melaksanakan rapat koordinasi teknis tindak lanjut kebijakan Pemerintah Pusat yakni pembangunan Gerai dan Kelengkapan KDMP, dengan peserta 20 Camat se-Kabupaten Nganjuk. Dilanjutkan dengan Rapat koordinasi dengan perwakilan Kecamatan se Kabupaten Nganjuk terkait tindak lanjut pengelolaan keuangan di desa.

   Realisasi Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa adalah:

   Penyaluran Dana Desa Tahap I: tersalur ke 44 Desa

   Penyaluran Alokasi Dana Desa I : tersalur ke 264 Desa

   Penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dapat tercapai maksimal karena ada beberapa hal, yakni:

   a. Pemenuhan Persyaratan Penyaluran Dana Desa yang belum maksimal dilaksanakan oleh desa, yakni penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

   b. Penetapan pagu definitif Dana Desa yang cenderung

terlambat, yakni ditetapkan setelah APB Desa se Kabupaten Nganjuk telah ditetapkan.

2. Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa

   Wujud kerja sebagai upaya mencapai target kinerja Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa yang telah ditetapkan, Bidang Keuangan, Aset, dan Ekonomi Desa telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

   Pelaksanaan pembinaan pengelolaan BUM Desa kepada 40 Direktur BUM Desa di Kabupaten Nganjuk. Pelaksanaan Pembinaan tidak dapat dilaksanakan kepada seluruh desa dikarenakan adanya efisiensi anggaran, sehingga hanya dapat memfokuskan pelaksanaan pembinaan tatap muka kepada 40 desa. Disamping melaksanakan pembinaan tatap muka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk juga melaksanakan evaluasi secara langsung terhadap pengelolaan BUM Desa dengan melaksanakan Monitoring dan evaluasi BUM Desa. Pada Tribulan I, pelaksanaan monitoring dan evaluasi diagendakan terlaksana di 10 Kecamatan.

3. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

   Pada fasilitasi pengelolaan aset desa, pembinaan pengelolaan aset desa secara tatap muka telah dilaksanakan kepada 40 desa. Serta memfokuskan pada fasilitasi penyelesaian tukar menukar tanah kas desa. Sinergitas terhadap kebijakan pusat berupa penyiapan lahan untuk pembangunan gerai pergudangan KDMP juga terus dilaksanakan dan diupayakan.

- ***Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat***.

  Analisis capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2026 Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat data keluaran/output sebagai berikut:

  1. Penataan LKD
  2. Peningkatan kapasitas LKD
  3. Pelatihan UEM di desa dengan pendanaan APBDes atau swadaya dan atau sumber pendanaan lainnya
  4. Fasilitasi pemanfaatan TTG/ Pelatihan TTG di desa dengan pendanaan APBDes atau swadaya dan atau sumber pendanaan lainnya
  5. Pelaksanaan gotong royong di desa
  6. Pelaksanaan kegiatan PKK desa
  7. Laporan score card village tiap desa

  Sampai dengan tribulan I tahun 2026, untuk mendukung capaian Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, sudah terlaksana kegiatan sebagai berikut:

  1. Rakor penataan LKD
  2. Rapat pengurus PKK dan pleno PKK
  3. Peningkatan kapasitas posyandu

II. Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

- **Analisis realisasi output Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :**

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi berupa jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan keluaran DPA dan Anggaran Kas sudah dilaksanakan pada Tribulan I.
2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan keluaran 31 orang/bulan.
3. Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : sudah dilaksanakan pada Tribulan I.
4. Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dengan keluaran : Laporan LRA, Fungsional, DTH, laporan e-cortex dan verifikasi BMD per bulan.
5. Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan keluaran : dalam proses (untuk penjor)
6. Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
7. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
8. Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
9. Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
10. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
11. Jumlah Laporan penyediaan jasa Surat Menyurat dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
12. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.

13. Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
14. Jumlah Mebel yang di pelihara dengan keluaran : proses dilaksanakan.
15. Jumlah Peralatan Mesin yang di pelihara dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
16. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Gedung yang di pelihara/di rehabilitasi dengan keluaran : sudah dilaksanakan.

2. **Dalam pelaksanaan Program Penataan Desa telah direalisasi keluaran yaitu data Desa yang *mendapatkan fasilitasi penataan desa***

- Realisasi keluaran Program Program Penataan desa didukung keluaran dari kegiatan penyelenggaraan penataan desa berupa : data desa yang mendapatkan fasilitasi di bidang penataan desa yang didukung oleh sub kegiatan :
  1. Fasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa dengan keluaran : Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa.

     Sampai dengan Tribulan I ini realisasinya 0.

     Analisis: Tidak adanya realisasi menunjukkan stabilitas struktur organisasi desa. Tidak ada urgensi untuk melakukan likuidasi desa akibat bencana besar atau penggabungan karena kegagalan penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi geografis dan demografis desa-desa di wilayah tersebut masih memenuhi syarat minimum menjadi desa definitif sesuai Pasal 5-11 Permendagri 1/2017.

2. Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan keluaran : data desa yang melaksanakan penetapan tata wilayah desa (Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai Permendagri 45 tahun 2016). Pada Tribulan I ada 10 desa yang mendapatkan fasilitasi tata wilayah desa. Dengan rincian 10 desa sudah sampai pada proses harmonisasi.
3. Fasilitasi Kewenangan Desa dengan keluaran jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi kewenangan desa. Pada tribulan I tidak ada realisasi, karena kegiatan fasilitasi kewenangan desa akan dilaksanakan pada tribulan berikutnya.
4. Fasilitasi Sarana Prasarana Desa dengan keluaran : Jumlah Unit Sarana Prasarana Desa hasil fasilitasi.Pada tribulan I fasilitasi sarana prasarana desa yang dilakukan adalah pendampingan kegiatan DPAL lanjutan BKK provinsi tahun 2024 yang tidak selesai dan dilanjutkan di tahun 2026.

3. **Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kerja Sama Desa telah direalisasi keluaran yaitu dokumen hasil fasilitasi kerja sama desa**.

- Realisasi keluaran Program Peningkatan Kerja Sama desa didukung keluaran dari kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa berupa : Dokumen hasil fasilitasi Kerjasama desa yang didukung oleh sub kegiatan :
  1. Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota dengan keluaran : dokumen hasil fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota.

     Pada Tribulan I ini dokumen yang dihasilkan adalah sebanyak (empat) 4 dokumen yaitu dokumen laporan pertanggungjawaban tahun 2026, dokumen perencanaan tahun 2026, dokumen perjanjian kerjasama BUMDESMA Sejahtera Mandiri Berbek Kecamatan Berbek dengan BUMDESMA Sejahtera Pace Kecamatan Pace, Dokumen Laporan Keuangan bulan Januari, Februari, Maret.

2. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dengan keluaran : dokumen hasil fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga sebanyak (empat) 4 dokumen perjanjian kerjasama desa dengan pihak ketiga yaitu : Dokumen perjanjian sewa menyewa tanah antara perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan KPH Nganjuk dengan Pemerintahan desa Siwalan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, Dokumen perjanjian kerjasama sewa menyewa tanah antara perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara Perum Perhutani KPH Jombang dengan Pemerintahan desa Tempuran Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, Dokumen perjanjian sewa menyewa tanah antara perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan KPH Nganjuk dengan Pemerintahan desa Wengkal Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Dokumen perjanjian kerjasama sewa menyewa tanah antara perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara Perum Perhutani KPH Jombang dengan pemerintahan desa Lengkonglor Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.
3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan keluaran Dokumen Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan keluaran (dua) 2 Dokumen yaitu : Keputusan Bupati Nganjuk tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Nganjuk, Dokumen Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Lereng Wilis Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

4. Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa telah direalisasi keluaran yaitu
Bidang Bina Pemerintahan Desa.

- Realisasi Keluaran Progran Administrasi Pemerintahan Desa didukung keluaran dari kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa berupa Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

  1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi aplikasi simanis desa serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sehingga telah tercapai keluaran sebanyak 1 (satu) dokumen.

  2. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sub kegiatan ini telah dilaksanakan fasilitasi rekomendasi Bupati untuk pemberhentian perangkat desa karena usia genap 60 (enam puluh) tahun. Selama tribulan I rekomendasi bupati sebanyak 13 (tiga belas) rekomendasi, sedangkan untuk keluaran yaitu berupa laporan akan disusun pada Tribulan I/akhir tahun.
  3. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa telah dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan penyusunan laporan kepala desa akhir tahun sehingga ada sebagian pemerintah desa yang telah mengirim LPPD tahun 2026 kepada Bupati tepat waktu yaitu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada sub kegiatan ini telah tercapai keluaran sebanyak 1 (satu) laporan.
  4. Sedangkan untuk sub kegiatan yang lain dilaksanakan pada tribulan berikutnya.

5. Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa telah direalisasi keluaran yaitu

Bidang Keuangan Aset dan Ekonomi Desa

Adapun target keluaran yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan keluaran : 264 Desa.
2. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa dengan keluaran : 80 Direktur BUM Desa.
3. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dengan keluaran : 20 Dokumen.

6. **Realisasi keluaran Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dimaksud didukung keluaran dari kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa : data desa yang Kelembagaannya diberdayakan melalui peningkatan kapasitas. Didukung oleh sub kegiatan :**
   1. Sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan keluaran : 27 Dokumen.
   2. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat belum ada capaian output 245 lembaga.
   3. Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa belum dilaksanakan
   4. Sub kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna belum dilaksanakan
   5. Sub kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat belum dilaksanakan

6. Sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan keluaran : 29 dokumen.

II Analisis realisasi keuangan Perangkat Daerah Tahun 2026

❖ **Realisasi Keuangan pada Program Dinas PMD Tahun 2026**

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD anggaran Rp. 21.000.000,- dengan realisasi Rp. 15.004.689,- atau 71,45%.
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran Rp. 4.898.425.942,- dengan realisasi Rp. 1.044.380.573,- atau 21,32%.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD anggaran Rp. 2.000.000,- dengan realiasi Rp. 0,- atau 0,00%.
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD anggaran Rp. 2.000.000,- dengan realiasi Rp. 0,- atau 0,00%.
5. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor anggaran Rp. 1.994.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau 0,00%.
6. Penyediaan Bahan logistik kantor anggaran Rp. 26.268.265,- dengan realisasi Rp. 988.000,- atau 3,76%.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan anggaran Rp. 993.600,- dengan realisasi Rp. 964.794,- atau 97,10%.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan anggaran Rp. 2.500.000,- dengan realisasi Rp. 200.000.- atau 8%.
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD anggaran Rp. 122.402.375,- dengan realisasi Rp. 18.084.336,- atau 14,77%.
10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD anggaran Rp. 981.200,- dengan realisasi Rp. 719.280,- atau 73,31%.

11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran Rp. 33.768.000,- dengan realisasi Rp. 7.304.783,- atau 21,63%.
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik anggaran Rp. 58.900.000,- dengan realisasi Rp. 15.254.922,- atau 25,90%.
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan anggaran Rp. 212.550.000,25 dengan realisasi Rp. 62.117.764,- atau 29,23%.
14. Pemeliharaan Mebel anggaran Rp. 1.049.700,- dengan realisasi Rp. 0,- atau 0,00%.
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran Rp. 13.510.300,- dengan realisasi Rp. 9.590.000,- atau 70,98%.
16. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya anggaran Rp. 275.241.458,- dengan realisasi Rp. 78.628.446,- atau 28,57%.

❖ Realisasi keuangan Program Penataan Desa pada Tribulan I Tahun 2026 sebesar **: Rp. 1.810.000,-**

1. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa sebesar Rp. 0,-
2. Kegiatan fasilitasi kewenangan desa Rp. 0,-
3. Kegiatan fasilitasi sarpras desa Rp. 0,-
4. Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa Rp. 1.810.000,-

❖ Realisasi keuangan Program Peningkatan Kerja Sama Desa dan Tahun 2026

a. Kegiatan fasilitasi Kerjasama Desa antar desa dalam kabupaten/ kota dengan Anggaran sebesar Rp. 46.668.000,- sampai dengan pada tribulan I sudah dilaksanakan dan sudah terealisasi sebesar Rp.8.304.783,- atau 17 %.

b. Kegiatan fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga dengan Anggaran sebesar Rp. 5.900.000,- sampai dengan pada baru dilaksanakan pada tribulan II sesuai anggaran kas dan rencana aksi kegiatan Penataan dan kerjasama Desa.

c. Kegiatan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Anggaran sebesar Rp. 42.668.000,- sampai dengan pada pada tribulan I sudah terealisasi sebesar Rp. 7.054.783,- atau 16 %

❖ Analisis Realisasi Keuangan Perangkat daerah tahun 2026 Program Administrasi Pemerintahan Desa pada Bidang Bina Pemerintahan Desa tahun 2026.

Realisasi Keuangan pada Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelengagaran Administrasi Pemerintah desa sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 335.474.250,- didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-.realisasi pada tribulan I dalam proses pengajuan ke bagian keuangan.
2. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan anggaran sebesar Rp 8.000.000,- pada tribulan I telah terealisasi sebesar Rp 900.000,- atau 11,25 %.
3. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp 5.000.000,- pada tribulan I telah terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 60%.

❖ **Realisasi Keuangan Program Keuangan Aset dan Ekonomi Desa**
Realisasi Keuangan Program Administrasi Pemerintahan Desa pada Bidang Keuangan Aset dan Ekonomi Desa tahun 2026 sebesar Rp. 2.929.993.000,- yang terdistribusikan pada 3 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan jumlah anggaran Rp. 2.898.873.000,- dengan realisasi sampai dengan tribulan I adalah Rp. 851.617.151,- atau 29,38%.
2. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa dengan jumlah anggaran Rp**.** 20.560.000,- terrealisasi sampai dengan Tribulan I sejumlah Rp. 6.930.000,- atau 33,71%.
3. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dengan jumlah anggaran Rp. 10.560.000,- telah terrealisasi sampai dengan Tribulan I sejumlah Rp. 4.390.000,- atau 41,57%.

❖ **Realisasi keuangan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**, **Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Tahun 2026**

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Anggaran sebesar Rp. **63.620.400,-** realisasi keuangan sebesar Rp. **2.599.000,-** atau **4,08**%.
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Anggaran sebesar Rp. **25.000.000,-** realisasi keuangan sebesar realisasi keuangan sebesar Rp. **6.237.000**,- atau **24,95**%.
3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Anggaran sebesar Rp. **3.000.000,-** realisasi keuangan sebesar Rp. **0**,- atau **0**%.
4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Anggaran sebesar Rp. **3.000.000**,- realisasi keuangan sebesar Rp. **0,-** atau **0**%.

5. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Anggaran sebesar Rp. **10.000.000**,- realisasi keuangan sebesar Rp. **0**,- atau **0%.**
6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Anggaran Sebesar Rp. **380.000.000,-** realisasi keuangan sebesar Rp. **51.389.783,-** atau **13,52%.**

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
1	Tujuan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dengan kegiatan Pemutakhiran Data Desa bersumber dari Data Profil Desa	Masih Banyaknya jumlah Desa dengan status indeks Desa Membangun dalam katagori berkembang dan Maju
2	Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Desa	Adanya Program peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD dan Desa baik dari Kementerian dan Dinas PMD Provinsi Jatim.	Tenaga Pendamping Desa belum memiliki kemampuan yang merata dalam pendampingan dan belum sesuai harapan.
3		Regulasi tentang Desa semakin lengkap.	Masih adanya regulasi yang tumpang tindih.
4		Adanya kegiatan evaluasi dan perlombaan yang memacu semangat dan motivasi.	Kemampuan SDM dalam memahami regulasi yang berlaku secara menyeluruh.
5		Kebijakan ekonomi yang berpihak pada urusan pemberdayaan masyarakat.	Kondisi keberdayaan dan ketahanan ekonomi masyarakat yang masih rendah/ lemah.
6		Tersedianya dukungan anggaran APBD untukurusan pemberdayaan masyarakat.	Kondisi keberdayaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat masih rendah.
7		Tersedianya sumber daya alam (SDA) yang potensial untuk dikembangkan.	Terbatasnya kualitas sikap, nilai dan budaya gotong royong pada masyarakat untuk menuju kemandirian.

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
8		Potensi eksistensi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.	Terbatasnya motivasi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam (SDA).
9		Keterbukaan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat	Terbatasnya kemampuan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan dalam tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
1	**PROGRAM PENATAAN DESA**		
2	**Penyelenggaraan Penataan Desa**		
3	Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status	Telah dilakukannya kegiatan rutin update status desa secara berkala setiap tahun sehingga mudah untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan	Pada tahun 2026 ini Adanya peralihan dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) yang sebelumnya 3 indikator menjadi 6 indikator maka perlu sosialisasi dan pendampingan yang intensif kepada desa pada saat melakukan pemutakhiran data indeks desa sehingga tidak terjadi penurunan status desa. Karena jumlah kuesioner yang banyak

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
			(1879 pertanyaan) memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengisian
4			Pemahaman yang keliru dari pemerintah desa yang tidak mau meningkat status desanya karena takut anggaran Dana Desa Berkurang
5			Pada pelaksanaan update status desa, pemerintah desa terlalu bergantung pada pendamping desa
6	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Perpres no 23 tahun 2021 dan Permendagri 45 tahun 2016	Dukungan anggaran APBD yang kurang untuk pelaksanaan fasilitasi tata wilayah desa
7		Koordinasi antara Dinas PMD Provinsi, Badan Informasi dan Geospasial dengan Dinas PMD Kabupaten selalu intens untuk percepatan kegiatan tata wilayah desa	Hasil pelaksanaan PPBDes harus mendapatkan berita acara verifikasi teknis dari BIG sebagai dasar penyusunan Perbup dan verifikasi yuridis dari Kemenkumham dan Kemendagri yang jadwalnya ditentukan oleh provinsi/ pusat sehingga memperlambat penyusunan perbup
8			Pemerintah Daerah tidak mempunyai tenaga teknis sehingga pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga/ swakelola tipe 2
9	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Dukungan anggaran dari APBD untuk kegiatan fasilitasi penataan kewenangan desa	Belum semua pemerintah desa memahami tentang perdes kewenangan desa dan

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
			implementasinya
10		Perbup 35 tahun 2016 tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dantelah ditindaklanjuti oleh 264 desa yang sudah menyusun perdes kewenangan desa	
11	Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa	Dukungan anggaran dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten untuk kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa	Keterbatasan waktu pelaksanaan karenasarpras desa yang bersumber dari BKK baru bisa dilaksanakan setelah PAK
12	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		
13	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**		
14	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	PP no 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	Belum semua kegiatan kerjasama antar desa membentuk BKAD
15		Permendagri no 96 tahun 2017 tentang Tata Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa,	Kurangnya motivasi dari pengelola Bumdesma untuk membentuk unit usaha baru selain DBM
16		Permendesa no 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama	Perlu adanya peningkatan kapasitas untuk direktur unit unit lain

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
17		Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat	Efisiensi biaya operasinal Bumdesma perlu diperhatikan
18		Peraturan Bupati no 4 tahun 2022 tentang Perlindungan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Mlik Desa Bersama	
19		Dukungan anggaran dari APBD untuk kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa	
20		Telah bertransformasinya kegiatan pengelolaan DBM Eks PNPM menjadi Bumdesma Lkd	
21	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Permendagri 96 tahun 2017 tentang Tata Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa	Perjanjian Kerja Sama yang dibuat masih sederhana dan belum menunjukkan menguntungkan bagi pemerintah desa
22		Dukungan anggaran dari APBD untuk kegiatan fasilitasi kerjasama antara desa dengan pihak ketiga	Belum semua desa yang sudah melakukan kerjasama desa dengan pihak ketiga melaporkan kepada Dinas PMD sehingga belum bisa memfasilitasi semua desa dan belum teridentifikasi semua permasalahan

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
23			Perlu adanya pembaharuan dokumen perjanjian kerjasama yang sudah habis masa berlakunya
24	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Permendes PDTT nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan	Setelah pembentukan BKAD dan Bumdesma Kawasan tidak ada pendampingan sehingga tidak ada program kerja
25		Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk 2010-2030	
26		Perbup nomor 11 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Telah ditetapkannya Kawasan Perdesaan dengan SK Bupati Nganjuk Nomor 188/70/K/411.013/2016	Masing-masing desa masih memikirkan ego sektoral masing masing dan belum berfikir secara holistik dan kompherensif untuk bersama2 membangun kawasan perdesaan
27		Adanya dukungan anggaran dari APBD untuk fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Belum dibuat perencanaan pengembangan kawasan yang matang dan belum ada penyertaan modal dari desa untuk pengembangan kawasan perdesaan
28		Telah dibentuk BKAD Kawasan dan Bumdesma Kawasan	Belum aktifnya Bumdesma Kawasan terutama untuk kecamatan Ngetos
29	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
30	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		
31	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.	Aparat Pemerintahan Desa yang kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugas administrasi. Kurangnya memahami prosedur administrasi yang benar,pengelolaan data, atau penggunaan teknologi informasi yang efektif.
32		Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa	
33	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Keterbatasan SDM Perangkat Desa
34		Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa	Tidak tepat waktu dalam tahapan penyusunan produk hukum desa
35		SK Petunjuk Teknis Penyusunan APBDes	
36		Tim Evaluasi dan klarifikasi penyusunan produk hukum desa	
37	Fasilitasi Penyusunan PerencanaanPembangunan Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Keterbatasan kemampuan SDM Perangkat Desa

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
38		Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Keterbatasan tenaga ahli dalam bidang perencanaan
39		Tim Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
40	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, didukung oleh tim yang solid 2. Adanya digitalisasi pengelolaan keuangan desa melalui SISKEUDES	5. Kurangnya jumlah SDM dalam membina desa 6. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan pembinaan yang cenderung sedikit, akibat efisiensi anggaran.
41	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Keterbatasan Kemampuan SDM Perangkat Desa
42		Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Keterbatasan penguasaan teknologi informasi
43		Media Pembelajaran Mandiri Aparatur Pemerintah Desa (Sibermata Desa)	
44		Perangkat Desa Mengikuti Program P3PD dari Kemendagri	
45	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Target peningkatan ekonomi desa sesuai tugas dan fungsi organisasi.	1. Kurangnya jumlah SDM dalam membina BUM Desa 2. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan pembinaan yang cenderung sedikit, akibat efisiensi anggaran.

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
46	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Adanya Kepala Desa yang bermasalah dengan hukum
47		Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Pelayanan terhadap masyarakat menjadi terhambat
48		Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun	UU Nomor 3 Tahun 2024 belum ditindaklanjutan PP yang mengaturnya
49	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Proses pemberhentian dan pengangkatan terhambat karena UU 3/2024 belum adanya PPnya.
50		Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Belum ada peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024
51	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Proses penyusunan profil desa membutuhkan waktu dan upaya yang cukup. Namun, desa seringkali memiliki jadwal yang padat dengan sumber daya manusia yang terbatas. Keterbatasan waktu dan personel yang tersedia dapat menghambat pelaksanaan yang efektif dari penyusunan profil desa.
52		Evaluasi Kinerja Desa	Keterbatasan data yang dimiliki oleh desa

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
53		Permendagri 12 Tahun 2007	Tidak melakukan upditing profil desa
54	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1. Target peningkatan ekonomi desa sesuai tugas dan fungsi organisasi 2. Anggaran APBD untuk Kegiatan PembinaanPengelolaan Aset Desa, 3. Digitalisasi Pengelolaan Aset Desa melalui Aplikasi SIPADES 3.0	7. Kurangnya jumlah SDM dalam membina pengelolaan aset desa 8. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan pembinaan yang cenderung sedikit, akibat efisiensi anggaran.
55	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	SDM Anggota BPD kurang memadahi
56		Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Kurangnya koordinasi antara Pemerintahan Desa dan Anggota BPD
57		Perpanjangan masa jabatan anggota BPD dari 6 tahun menjadi 8 tahun	
58		Media pembelajaran mandiri anggota BPD (Sibermata Desa)	
59		Anggota BPD Mengikuti Program P3PD dari Kemendagri	
60	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kurang tertibnya administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
61			Keterbatasan SDM Pemerintahan Desa
		Permendagri Nomor 46/ 2016	Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan Anggota BPD
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Keterbatasan Data yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa
		Permendagri 81 tahun 2015	Pemerintahan desa kurang tertib dalam mengupdate Epdeskel
65	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		
66	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
67	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan	anggaran pembinaan dari APBD, Perbub	Perlunya pendampingan implementasi

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
	dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1/2020 tentang LKD sebagai dasar hukum legalitas LKD, Permendagri no 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, SK Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/251/K/411.013/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Pos Pelayanan Terpadu	posyandu 6 SPM
68	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	anggaran pembinaan dari APBD, Perbub 1/2020 tentang LKD sebagai dasar peningkatan kapasitas	Pemerintah Desa kurang melibatkan LKD sesuai dengan tugas fungsinya, Perlunya Peningkatan Kapasitas bagi LKD
69	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	anggaran pembinaan dari APBD, dukungan pembinaan lintas OPD sesuai tupoksinya	kurangnya usaha ekonomi masyarakat yang terintegrasi dengan BUMDesa
70	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	anggaran pembinaan dari APBD, anggaran dari APBDes	Pemerintah desa belum menjadikan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebagai prioritas pembangunan di desa
71	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	anggaran pembinaan dari APBD	Semakin lunturnya nilai gotong royong masyarakat, pemdes kurang aktif melaporkan

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
			kegiatan Gotong royong
72	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Perpres 99/2017 dan Permendagri 36/2020 yang mengatur tentang PKK, anggaran fasilitasi pembinaan dari APBD dan APBDesa, dukungan Pengurus TPPKK Kabupaten yang aktif	TP PKK Desa masih banyak yang tidak aktif, hanya menjadikan kegiatan PKK sebagai formalitas, banyak yang tidak membuat laporan tahunan PKK

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Laporan Capaian Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 disusun sebagai bentukpertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2026 yang merupakan penjabaran Renstra DPMD tahun 2025 – 2029. Laporan dimaksud memuat informasi tentang Pencapaian Rencana Kerja Tahun 2026 dan progress capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 yang implementasinya tertuang dalam RKA-K/L, serta permasalahan dan upaya penyelesiannya.

Penyusunan Laporan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini diucapkan banyak terima kasih, semoga dapat bermanfaat dan digunakan sesuai tujuan penyusunannnya.

IV.2. Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk tahun 2026 disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai, ketersediaan anggaran menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan renja sesuai dengan kebutuhan. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan renjamaka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan sub kegiatan dengan prioritas yang kecuali dalam mendukung IKU maupun IKI.

Untuk pelaksanaan renja diperlukan beberapa kaidah yaitu seluruh unsur perangkat Daerah dan stakeholder terkait harus melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dengan sebaik – baiknya. Setiap unsur perangkat Daerah senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan diperlukan juga koordinasi yang baik antar unsur Perangkat daerah (bersinergi dan kolaborasi untuk menyukseskan pelaksanaan renja tahun berikutnya).

Rencana Tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
2. Memperkuat koordinasi sehingga tercipta sinergi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder Dinas PMD
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjung lapang, pembuatan laporan rakor berkala, pendampingan teknis dan fasilitas lain terutama terhadap jajaran Pemerintahan Desa yang

merupakan wilayah binaan Dinas PMD.

4. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur Kegiatan.

5. Memberikan reward dan punishmen sesuai dengan performasi masing – masing.

Nganjuk, 9 April 2026
an. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Nganjuk
Sekretaris Dinas

DEDIH SUTARDI, A.P, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19750529 199403 1 004

FORMULIR E 81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

RENJA KABUPATEN NGANJUK

PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2026

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra 2025-2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu(2025)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2026)			Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kab./Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II		III		IV											
												9		10		11		12				13			14=13/8		15=7+13		16=15/6		17
	4	5	6			7			8			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				19.726.582.568			9.799.130.876,00			9.431.855.040,25		2.163.066.905,00		-		-		-		2.163.066.905,00			22,91		11.962.197.781,00		60,64		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		79		11.479.077.568	74,15	Nilai	1.078.051.009,00	76		5.673.584.840,25		1.234.233.971,00		-		-		-		1.234.233.971,00			21,75		2.312.384.980,00		20,14		BPMD
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	79	Nilai	11.479.077.568	74,15	Nilai	1.078.051.009	76	nilai	5.673.584.840	-	Nilai 1.234.233.971		Nilai		Nilai		Nilai	-	Nilai 1.234.233.971,00		-	21,75	74,15	Nilai 2.312.384.980	94,46	20,14		BPMD
01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*18*		*60.750.000*	*18*	*Dokumen*	*39.114.250*			*21.000.000*		*15.004.689*								*15.004.689*			71,45	18		54.118.939	100,00	89,08	
01.000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	18	laporan	60.750.000	18	Dokumen	39.114.250	18	Laporan	21.000.000	8	laporan 15.004.689		laporan		laporan		laporan	8	Laporan 15.004.689		44	71,45	26	laporan	54.118.939	144,44	89,08	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				60.750.000		Dokumen	39.114.250			21.000.000		15.004.689								15.004.689			71,45			54.118.939		89,08	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	18	laporan	60.750.000	18	Dokumen	39.114.250	18	Laporan	21.000.000	8	Laporan 15.004.689		Laporan		Laporan		Laporan	8	Laporan 15.004.689		44	71,45	26	Laporan	54.118.939	144,44	89,08	
02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				*7.622.226.000*	*105*	*Dokumen*	*44*			*4.902.425.942*		*1.044.380.573*								*1.044.380.573*			21,30			1.044.380.617		13,70	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	31	Orang	7.622.226.000				31	Orang/12 Bulan	4.898.425.942	31	Orang/bulan 1.044.380.573		Orang/bulan		Orang/bulan		Orang/bulan	31	Orang/bulan 1.044.380.573		100	21,32	31	Orang/bulan	1.044.380.573	100,00	13,70	
02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.622.226.000			4.469.531.683			4.898.425.942		1.044.380.573								1.044.380.573			21,32	-		5.513.912.256		72,34	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	Orang	7.622.226.000	31	Orang/12 Bulan	4.469.531.683	31	Orang/12 Bulan	4.898.425.942	31	Orang/bulan 1.044.380.573		Orang/bulan		Orang/bulan		Orang/bulan	31	Orang/bulan 1.044.380.573		100	21,32	62	Orang/bulan	5.513.912.256	200,00	72,34	
	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	72	laporan	29.600.000	72	laporan	26.006.000	72	Laporan	4.800.000	33	laporan -		laporan		laporan		laporan	33	-		46	0,00	105	laporan	26.006.000	145,83	87,86	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	laporan		2	laporan		2	Laporan		2	laporan		laporan		laporan		laporan	2			100		4	laporan		200,00		
02.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				13.400.000			5.593.000			2.300.000		-								-			0,00	-		5.593.000		41,74	

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra 2025-2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu(2025)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2026)			Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kab./Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I			II			III			IV										
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	laporan	13.400.000	2	laporan	5.593.000	2	Laporan	2.000.000	2	laporan	-		laporan			laporan			laporan		2	-	100	0,00	4	laporan	5.593.000	200,00	41,74	
92.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				16.200.000			20.413.000			2.000.000			-										-		0,00	-		20.413.000		126,01	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	72	laporan	16.200.000	72	laporan	20.411.000	72	Laporan	2.000.000	33	laporan	-		laporan			laporan			laporan		33	-	46	0,00	105	laporan	20.413.000	145,83	0,00	
06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1.158.258.000			331.298.120			155.139.440			1.952.794										1.952.794		1,26	-		333.245.914		28,77	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		126.200.000	1	Paket	76.641.862	1	Paket	29.255.865	-	Paket	1.952.794		Paket			Paket			Paket		-	1.352.794	-	6,67	1	Paket	78.594.656	100,00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2			2	Paket		2	Paket		1	Paket			Paket			Paket			Paket		1		50		3	Paket		150,00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8			8	Paket		8	Paket		2	Paket			Paket			Paket			Paket		2		25		10	Paket		125,00		
06.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				1.650.000			19.982.930			1.994.000			-										-		0,00	-		19.982.930		1211,09	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	paket	1.650.000	1	Paket	19.982.930	1	Paket	1.994.000	-	Paket	-		Paket			Paket			Paket		-	-	-	0,00	1	Paket	19.982.930	100,00	1211,09	
06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				105.600.000			54.685.932			26.268.265			988.000										988.000		3,79	-		55.674.932		52,72	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	paket	105.600.000	8	Paket	54.685.932	2	Paket	26.268.265	2	Paket	988.000		Paket			Paket			Paket		2	988.000	1	3,79	10	Paket	55.674.932	125,00	52,72	
06.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.100.000			1.972.000			993.600			964.794										964.794		97,10	-		2.936.794		71,63	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	paket	4.100.000	2	Paket	1.972.000	8	Paket	993.600	1	Paket	964.794		Paket			Paket			Paket		1	964.794	0	97,10	3	Paket	2.936.794	150,00	71,63	
	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	600	laporan	1.032.058.000	550	Laporan	254.651.258	600	Laporan	125.883.575	97	Laporan	19.003.616		Laporan			Laporan			Laporan		97	19.003.616	0	15,10	647	Laporan	273.654.874	107,83	26,52	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	Dokumen		12	Dokumen		12	Dokumen		3	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen		3		0		15	Dokumen	-	125,00		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.300	Dokumen		2.991	Dokumen		3.000	Dokumen		344	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen		344		0		3.335	Dokumen	-	111,17		
06.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.400.000			3.000.000			2.500.000			200.000										-	200.000		8,00	-		3.200.000		59,26	

e	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra 2025-2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2025)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2026)		Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kab./Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I			II			III			IV												
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	Dokumen	5.400.000	12	Dokumen	3.000.000	12	Dokumen	2.500.000	3	Dokumen	200.000		Dokumen			Dokumen			Dokumen		3		200.000	0	8,00	15	Dokumen	3.200.000	125,00	59,26	
96.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				978.258.000			236.635.799			122.402.375			18.084.336										-	18.084.336		14,77	-		254.920.135		26,06	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	600	Laporan	978.258.000	2.991	laporan	236.635.799	600	Laporan	122.402.375	97	Laporan	18.084.336		Laporan			Laporan			Laporan		97		18.084.336	0	14,77	3.088	Laporan	254.920.135	514,67	26,06	
06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				48.400.000			14.815.459			981.200			719.280											719.280		73,31	-		15.534.739		32,10	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.000	Dokumen	48.400.000	2.991	Dokumen	14.815.459	3.000	Dokumen	981.200	344	Dokumen	719.280		Dokumen			Dokumen			Dokumen		344		719.280	0	73,31	3.335	Dokumen	15.534.739	111,17	32,10	
08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				*147.189.565*			*86.253.529*			*92.668.000*			*22.559.705*											*22.559.705*		24,34	-		108.813.234		73,93	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	laporan	147.189.565	24	laporan	86.253.529	24	Laporan	92.668.000	6	Laporan	22.559.705		Laporan			Laporan			Laporan		6		22.559.705	25	24,34	30	Laporan	108.813.234	125,00	73,93	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	laporan		2	laporan		2	Laporan		-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan		-			-		2	Laporan		100,00		
08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				41.000.000			26.853.453			33.768.000			7.304.783											7.304.783		21,63	-		34.158.236		79,44	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	Laporan	41.000.000	2	laporan	26.853.453	2	Laporan	33.768.000	-	Laporan	7.304.783		Laporan			Laporan			Laporan		-		7.304.783	-	21,63	2	Laporan	34.158.236	100,00	79,44	
06.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.500.000			59.400.076			58.900.000			15.254.922											15.254.922		25,90	-		74.654.998		74,28	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	Laporan	100.500.000	24	laporan	59.400.076	24	Laporan	58.900.000	6	laporan	15.254.922		laporan			laporan			laporan		6		15.254.922	25	25,90	30	laporan	74.654.998	125,00	74,28	
09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				*1.276.450.000*		*1*	*621.390.066*			*502.351.458,25*			**150.336.210**											*150.336.210*		29,93	-		771.726.276		60,46	
	Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang	20	Unit	1.276.450.000	20	Unit	621.390.066,00	20	Unit	502.351.458,25	-	Unit	**150.336.210**		Unit			Unit			Unit		-		150.336.210	-	29,93	20	Unit	771.726.276	100,00	60,46	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	Unit		2	Unit		2	Unit		-	Unit			Unit			Unit			Unit		-			-		2	Unit		100,00		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	Unit		7	Unit		7	Unit		3	Unit			Unit			Unit			Unit		3			43		10	Unit		142,86		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	Unit		40	Unit		40	Unit		-	Unit			Unit			Unit			Unit		-			-		40	Unit		100,00		
09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				476.750.000			326.320.757			212.550.000,25			62.117.764											62.117.764		29,23	-		368.438.521		61,48	

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra 2025-2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu(2025)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2026)		Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kab./Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I			II			III			IV												
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	Unit	476.750.000	7	Unit	326.320.757	7	Unit	212.550.000,25	3	Unit	62.117.764		Unit			Unit			Unit		3		62.117.764	43	29,23	10	Unit	388.438.511	142,86	81,48	
8.000	Pemeliharaan Mebel					5.500.000			1.270.750			1.049.700			-											-		0,00	-		1.270.750		59,47	
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	unit	5.500.000	20	Unit	1.270.750	20		1.049.700	-	Unit	-		Unit			Unit			Unit		-		-	-		0,00	20	Unit	1.270.750	100,00	59,47	
9.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					64.200.000			38.850.000			13.519.300			9.590.000											9.590.000		70,98	-		48.440.000		75,45	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	Unit	64.200.000	40	Unit	38.850.000	40	Unit	13.519.300	-	Unit	9.590.000		Unit			Unit			Unit		-		9.590.000	-	70,98	40	Unit	48.440.000	100,00	75,45	
0.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					730.000.000			252.948.539			275.241.458			78.628.446											78.628.446		28,57	-		331.577.005		45,42	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	Unit	730.000.000	1	Unit	252.948.539	2	Unit	275.241.458	-	Unit	78.628.446		Unit			Unit			Unit		-		78.628.446	-	28,57	2	Unit	331.577.005	100,00	45,42	
	PROGRAM PENATAAN DESA					190.605.000			91.008.000			56.420.800			1.810.000											1.810.000		1,21	-		92.818.000		48,70	
	Meningkatnya Penataan Desa yang Legal, Efektif dan Berkelanjutan	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi penataan Desa (%)	37		190.605.000	25,76	persen	91.008.000	28	persen	56.420.800		Persen	1.810.000		Persen			Persen			Persen		-			-	0,00	28	Persen	91.008.000	69,62	47,75	
91	*Penyelenggaraan Penataan Desa*					190.605.000	68	*Desa*	*91.008.000*			56.420.800			1.810.000													0,00	68		91.008.000		47,75	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	10	Unit	190.605.000	22	Unit	91.008.000	10	Unit	56.420.800	1	Unit			Unit			Unit			Unit		1			10	0,00	23	Unit	91.008.000	230,00	47,75	
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	39	Desa		27	Desa		25	Desa		-	Desa			Desa			Desa			Desa		-			-		27	Desa	-	69,23			
		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	1	Desa		-	Desa		1	Desa		-	Desa			Desa			Desa			Desa		-			-		-	Desa	-	0,00			
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	48	Desa		19	Desa		30	Desa		-	Desa			Desa			Desa			Desa		-			-		19	Desa	-	39,58			
01.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa					29.400.000			10.905.800			10.900.800			-											-		0,00	-		10.905.800		37,09	
	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	1	Desa	29.400.000	-	Desa	10.905.800	1	Desa	10.900.800	-	Desa	-		Desa			Desa			Desa		-		-	-		0,00	-	Desa	10.905.800	0,00	37,09	
01.000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa					71.205.000			30.082.600			25.720.800			1.810.000											1.810.000		7,04	-		31.892.600		43,57	
	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	48	Desa	71.205.000	19	Desa	30.082.600	30	Desa	25.720.800	10	Desa	1.810.000		Desa			Desa			Desa		10		1.810.000	33	7,04	29	Desa	31.892.600	90,42	43,57	
91.000	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa					44.000.000			7.684.800			10.900.000			-											-		0,00	-		7.684.800		17,47	
	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	39	Desa	44.000.000	27	Desa	7.684.800	25	Desa	10.900.000	-	Desa	-		Desa			Desa			Desa		-		-	-	0,00	27	Desa	7.684.800	69,23	17,47	

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra 2025-2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2025)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2026)			Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kab./Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I			II			III			IV														
01.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa				44.000.000			42.334.800			8.900.000			-										-			0,00			42.334.800		96,22	
	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	10	Unit	44.000.000	72	Unit	42.334.800	10	Unit	8.900.000	-	Unit	-		Unit			Unit			Unit		-	-	-	0,00	22	Unit	42.334.800	220,00	96,22	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				281.200.000			122.671.867			95.236.000																0,00			122.671.867		43,62	
	Terjalinnya Kerjasama Desa yang Produktif dan Legal	Persentase Desa yg melaksanakan kerja sama yang produktif dan legal (%)	87		281.200.000	67	Desa	122.671.867	87	persen	95.236.000		Persen	15.359.566		Persen			Persen			Persen			15.359.566	-	16,13	87	Persen	138.081.433	100,00	49,09	
01	*Fasilitasi Kerja Sama antar Desa*				*281.200.000*	*230*	Desa	*122.671.867*			95.236.000			15.359.566										15.359.566		16,13	230		138.081.433		49,09	
	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2	Dokumen	281.200.000	2	Dokumen	122.671.867	2	Dokumen	95.236.000	2	Dokumen	15.359.566		Dokumen			Dokumen			2			100	0,00	4	Dokumen	122.671.867	200,00	43,62	
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	Dokumen		10	Dokumen		10	Dokumen		4	Dokumen			Dokumen			Dokumen			4			40		14	Dokumen	-	140,00			
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	Dokumen		15	Dokumen		10	Dokumen		4	Dokumen			Dokumen			Dokumen			4			40		19	Dokumen	-	190,00			
01.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				136.700.000			85.830.830			46.968.000			8.304.783										8.304.783		17,80	-		94.135.613		68,86	
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	Dokumen	136.700.000	10	Dokumen	85.830.830	10	Dokumen	46.968.000	4	Dokumen	8.304.783		Dokumen			Dokumen			4		8.304.783	40	17,80	14	Dokumen	94.135.613	140,00	68,86	
01.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				43.500.000			4.955.800			5.300.000			-										-		0,00	-		4.955.800		11,39	
	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	Dokumen	43.500.000	2	Dokumen	4.955.800	10	Dokumen	5.300.000	4	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen			4		-	40	0,00	6	Dokumen	4.955.800	60,00	11,39	
01.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				101.000.000			31.885.237			42.668.000			7.054.783										7.054.783		16,53	-		38.940.020		38,55	
	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2	Dokumen	101.000.000	2	Dokumen	31.885.237	2	Dokumen	42.668.000	2	Dokumen	7.054.783		Dokumen			Dokumen			2		7.054.783	100	16,53	4	Dokumen	38.940.020	200,00	38,55	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				6.418.450.000			7.150.150.000			3.121.993.000			866.837.151										866.837.151		27,77	-		8.016.987.151		124,91	
	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik (%)	85,18	%	1.558.850.000	85	persen	2.290.550.000	77,79	persen	202.560.000			8.290.000									-	8.290.000	-	4,09	85		2.298.840.000	100,00	147,47	
01	*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*				*6.418.450.000*			*7.150.150.000*			*3.121.993.000*			*866.837.151*										*866.837.151*		27,77	-		8.016.987.151		124,91	
	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	Dokumen	1.558.850.000	1	Dokumen	2.290.550.000	1	Dokumen	202.560.000	1	Dokumen	8.290.000		Dokumen			Dokumen			1			100	0,00	2	Dokumen	2.298.840.000	200,00	146,94	

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra 2025-2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2025)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2026)			Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kab./Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II		III		IV												
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	1	Laporan		1	laporan		1	Laporan		-	Laporan		laporan		Laporan		Laporan							1	laporan		100,00			
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	2	laporan		2	laporan		1	Laporan		1	Laporan		laporan		Laporan		Laporan		1			100		3	Laporan		150,00			
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	1	laporan		1	laporan		1	Laporan		-	Laporan		laporan		Laporan		Laporan		-			-		1	Laporan		100,00			
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	264	Dokumen		264	Dokumen		264	Dokumen		-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		-			-		264	Dokumen		100,00			
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	390	Orang		390	Orang		2.640	Orang		-	Orang		Orang		Orang		Orang		-			-		390	Orang		100,00			
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	528	Dokumen		528	Dokumen		264	Dokumen		-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		-			-		528	Dokumen		100,00			
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	264	Dokumen		264	Dokumen		264	Dokumen		-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		-			-		264	Dokumen		100,00			
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	250	Dokumen		250	Dokumen		20	Dokumen		-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		-			-		250	Dokumen		100,00			
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	21	Dokumen		21	Dokumen		21	Dokumen		-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		-			-		21	Dokumen		100,00			
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	1.000	Orang		1.000	Orang		500	Orang		-	Orang		Orang		Orang		Orang		-			-		1.000	Orang		100,00			
01.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				44.000.000			44.000.000			5.000.000		-									-	0,00	-		44.900.000		100,00		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	Dokumen	44.000.000	1	Dokumen	44.000.000	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		1	-	100	0,00	2	Dokumen	44.900.000	200,00	100,00		
01.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				313.400.000			313.400.000			60.000.000		-									-	0,00	-		313.400.000		100,00		
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	528	Dokumen	313.400.000	528	Dokumen	313.400.000	528	Dokumen	60.000.000	-	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		-	-	-	0,00	528	Dokumen	313.400.000	100,00	100,00		
01.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				41.300.000			813.000.000			20.000.000		-									-	0,00	-		813.000.000		1000,00		
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	264	Dokumen	41.300.000	264	Dokumen	813.000.000	264	Dokumen	20.000.000	-	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		-	-	-	0,00	264	Dokumen	813.000.000	100,00	1000,00		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra 2025-2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2025)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2026)			Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kab./Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I			II			III			IV												
01.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				112.750.000			112.750.000			8.000.000			-										-		0,00	-		112.750.000		100,00	
	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	1.000	Orang	112.750.000	1.000	Orang	112.750.000	500	Orang	8.000.000	-	Orang	-		Orang			Orang			Orang		-	-		0,00	1.000	Orang	112.750.000	100,00	100,00	
01.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				185.000.000			185.000.000			24.000.000			-										-		0,00	-		185.000.000		100,00	
	Terselenggaranany a Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	1	laporan	185.000.000	1	laporan	185.000.000	1	Laporan	24.000.000	-	Laporan	-		Laporan			Laporan			Laporan		-	-		0,00	1	Laporan	185.000.000		100,00	
01.001	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				80.650.000			80.650.000			8.000.000			900.000										900.000		11,25	-		81.550.000		101,12	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	1	Laporan	80.650.000	1	laporan	80.650.000	1	Laporan	8.000.000	-	Laporan	900.000		Laporan			Laporan			Laporan		-	900.000		11,25	1	Laporan	81.550.000	100,00	101,12	
03.001	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				66.550.000			66.550.000			7.000.000			-										-		0,00	-		66.550.000		100,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	264	Dokumen	66.550.000	264	Dokumen	66.550.000	264	Dokumen	7.000.000	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen			Dokumen		-	-		0,00	264	Dokumen	66.550.000	100,00	100,00	
03.002	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				146.400.000			146.400.000			10.560.000			4.390.000										4.390.000		41,57	-		150.790.000		103,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	250	Dokumen	146.400.000	250	Dokumen	146.400.000	20	Dokumen	10.560.000	-	Dokumen	4.390.000		Dokumen			Dokumen			Dokumen		-	4.390.000		41,57	250	Dokumen	150.790.000	100,00	103,00	
01.001	Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				193.500.000			193.500.000			50.000.000			-										-		0,00	-		193.500.000		100,00	
	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	390	orang	193.500.000	390	Orang	193.500.000	268	Orang	50.000.000	-	Orang	-		Orang			Orang			Orang		-	-		0,00	390	Orang	193.500.000	100,00	100,00	
03.001	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				131.800.000			131.800.000			5.000.000			3.000.000										3.000.000		60,00	-		134.800.000		102,28	
	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	2	Laporan	131.800.000	2	laporan	131.800.000	2	Laporan	5.000.000	1	Laporan	3.000.000		Laporan			Laporan			Laporan		1	3.000.000	50	60,00	3	Laporan	134.800.000	150,00	102,28	
01.001	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				203.500.000			203.500.000			5.000.000			-										-		0,00	-		203.500.000		100,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	21	Dokumen	203.500.000	21	Dokumen	203.500.000	21	Dokumen	5.000.000	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen			Dokumen		-	-		0,00	21	Dokumen	203.500.000	100,00	100,00	
	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Desa	Persentase BUMDes yang aktif dan menghasilkan laba (%)	45	%	298.900.000	45	persen	298.900.000	25	%	20.560.000		Persen	6.930.000		Persen			Persen			Persen		-	6.930.000	-	33,71	45	Persen	305.830.000	100,00	102,32	
03	*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*				*6.438.450.000*			*7.150.150.000*			*3.121.993.000*			*866.837.151*										*866.837.151*		*27,77*	-		8.016.987.151		124,91	

te	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra 2025-2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2025)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2026)			Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kab./Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I			II			III			IV													
	Meningkatnya tingkat kesatifan BUM Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	119	Dokumen	298.900.000	118	Dokumen	298.900.000	264	Desa	20.560.000	-	Dokumen	6.930.000		Dokumen			Dokumen			Dokumen		-		6.930.000	-	33,71	118	Dokumen	305.830.000	99,16	102,32	
01.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				298.900.000			298.900.000			20.560.000			6.930.000											6.930.000		33,71	-		305.830.000		102,32	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	119	Dokumen	298.900.000	116	Dokumen	298.900.000	20	Dokumen	20.560.000	-	Dokumen	6.930.000		Dokumen			Dokumen			Dokumen		-		6.930.000	-	33,71	118	Dokumen	305.830.000	99,16	102,32	
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa	Persentase desa dengan tata kelola keuangan yang baik (%)	87	%	4.560.700.000	87	Persen	4.560.700.000	78	persen	2.898.473.000	25	Persen	851.617.151		Persen			Persen			Persen		25		851.617.151	32	29,38	112	Persen	5.412.317.151	128,74	118,67	
01	*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*				*6.414.450.000*			*7.150.150.000*			*3.121.993.000*			*866.837.151*											*856.837.151*		27,77	-		8.016.987.151		124,91	
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	230	Dokumen	4.560.700.000	264	Dokumen	4.560.700.000	206	Dokumen	2.898.473.000	111	Dokumen	851.617.151		Dokumen			Dokumen			Dokumen		511		851.617.151	248	29,38	775	Dokumen	5.412.317.151	336,96	118,67	
03.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				4.560.700.000			4.560.700.000			2.898.473.000			851.617.151											851.617.151		29,38	-		5.412.317.151		118,67	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	230	Dokumen	4.560.700.000	264	Dokumen	4.560.700.000	206	Dokumen	2.898.473.000	44	Dokumen	851.617.151		Dokumen			Dokumen			Dokumen		44		851.617.151	21	29,38	308	Dokumen	5.412.317.151	133,91	118,67	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1.357.250.000			1.357.250.000			484.620.400			60.185.783											60.185.783		12,42	-		1.417.435.783		104,43	
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Kapasitas kelembagaannya diberdayakan (%)	57	%	1.357.250.000	57	persen	1.357.250.000	37	persen	484.620.400	2,00	Persen	60.185.783		Persen			Persen			Persen		3		60.185.783	7	12,42	60	Persen	1.417.435.783	104,56	104,43	
01	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaksanya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*				*1.357.250.000*	*350*		*1.357.250.000*			*484.620.400*	-		*60.185.783*	-		-	-		-	-		-		60.185.783		12,42	150		1.417.435.783		104,43	
	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	300	Dokumen	1.357.250.000	300	Dokumen	1.357.250.000	300	Dokumen	484.620.400	27	Dokumen	60.185.783		Dokumen			Dokumen			Dokumen		27			9	0	327	Dokumen	1.357.250.000	109,00	100,00	

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra 2025-2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu(2025)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2026)			Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kab./Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I			II			III			IV												
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	384	Lembaga		384	Lembaga		384	Lembaga		-	Lembaga			Lembaga			Lembaga			Lembaga		-			-			384	Lembaga		100,00		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen		-			-			2	Dokumen		100,00		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	110	Dokumen		110	Laporan		110	Dokumen		29	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen		29			26			139	Dokumen		126,36		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2	Laporan		2	Laporan		2	Laporan		-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan		-			-			2	Laporan		100,00		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan		-			-			1	Laporan		100,00		
2.01.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				300.000.000			300.000.000			63.620.400		2.559.000									-	2.559.000		4,02	-		302.559.000		100,85		
	Terselenggaranya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	300	Dokumen	300.000.000	300	Dokumen	300.000.000	300	Dokumen	63.620.400	27	Dokumen	2.559.000		Dokumen			Dokumen			Dokumen	27	2.559.000	9	4,02	327	Dokumen	302.559.000	109,00	100,85		
2.01.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				161.150.000			161.150.000			25.000.000		6.237.000,00									-	6.237.000		24,95	-		167.387.000		103,87		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra 2025-2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2025)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2026)		Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kab./Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I			II			III			IV										
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	384	Lembaga	161.150.000	384	Lembaga	161.150.000	384	Lembaga	25.000.000	245	Lembaga	6.237.000,00		Lembaga			Lembaga			Lembaga	245	6.237.000	1	24,95	629	Lembaga	167.387.000	163,80	101,87	
01.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				57.400.000			57.400.000			5.000.000			-								-	-		0,00	-		57.400.000		100,00	
	Terlaksanannya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2	Dokumen	57.400.000	2	Dokumen	57.400.000	2	Dokumen	5.000.000	-	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen			Dokumen	-	-	-	0,00	2	Dokumen	57.400.000	100,00	100,00	
01.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				57.400.000			57.400.000			5.000.000			-								-	-		0,00	-		57.400.000		100,00	
	Terlaksanannya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2	Laporan	57.400.000	2	Dokumen	57.400.000	2	Laporan	5.000.000	-	Laporan	-		Laporan			Laporan			Laporan	-	-	-	0,00	2	Laporan	57.400.000	100,00	100,00	
01.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				81.300.000			81.300.000			10.000.000			-								-	-		0,00	-		81.300.000		100,00	
	Terlaksanannya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	Laporan	81.300.000	1	laporan	81.300.000	1	Laporan	10.000.000	-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan	-	-	-	0,00	1	Laporan	81.300.000	100,00	100,00	
01.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				700.000.000			700.000.000			380.000.000			51.389.783,00								-	51.389.783		13,52	-		751.389.783		107,34	
	Terlaksanannya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	110	Dokumen	700.000.000	110	Dokumen	700.000.000	110	Dokumen	380.000.000	29	Dokumen	51.389.783,00		Dokumen			Dokumen			Dokumen	29	51.389.783	26	13,52	139	Dokumen	751.389.783	126,36	107,34	
					19.726.582.568			9.799.130.876			9.431.855.040			2.163.066.905									2.163.066.905	1.903	15	27.002		293.161.710	12.356	124	
																								Rata-rata capaian kinerja		1.903	15,33	27.002		293.161.710	12.356	124,24	
																								Predikat		Rendah	Rendah					

Nganjuk, 9 April 2026
an. KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIS DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DPMD

DEDIH SUTARDI, A.P., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19750529 199403 1 004